

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

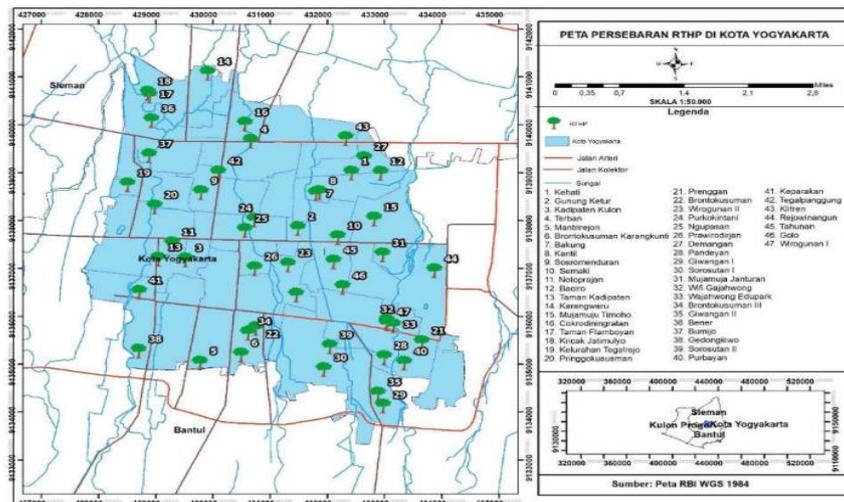
Pembangunan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dibanding sebelumnya. Dengan demikian, pembangunan harus mampu memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual maupun material. Pembangunan daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan pengelolaannya dilakukan dengan cara yang terpadu dan sejalan antara pembangunan nasional dan pengembangan wilayah. Namun, sering kali petunjuk perkembangan pembangunan daerah yakni kota membuat situasinya menjadi tidak terkendali.

Menurut Rushayati, yang dikutip dari Hariyanto saat ini perkembangan pembangunan kota menunjukkan kecenderungan ketidakseimbangan dalam aktivitas pembangunan, yang berdampak pada gangguan kondisi lingkungan (Hariyanto & Rangkuti, 2020). Kota mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan adanya perubahan dalam jumlah penduduk, pergeseran sosial dan ekonomi, serta interaksi yang terjadi dengan daerah-daerah lain. Dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi unsur penting bagi suatu kota karena berperan mengendalikan kualitas lingkungan di perkotaan secara estetis, sosial, dan ekologis.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah diharapkan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya menciptakan wilayah yang bersih, nyaman, sehat, dan indah. Setiap wilayah perkotaan diwajibkan menyediakan RTH sebesar 30% dari total luas wilayahnya. Dari persentase tersebut, 20% merupakan RTH Publik (RTHP) yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, sedangkan 10% sisanya merupakan RTH Privat (Suratman & Darumurti, 2021). Harapannya, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut nantinya bisa mengatasi konsekuensi buruk yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan.

Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai kota wisata dan pendidikan. Dengan wilayah seluas 32,50 km (Statistik, 2023) dan populasi sebesar 455,535 juta jiwa (Statistik, 2023) Kota Yogyakarta mengalami perkembangan pembangunan yang pesat. Jadi dengan situasi tersebut bisa menjadikan Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan untuk mengubah lahan terbuka, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjadi lahan yang dibangun. RTHP di Kota Yogyakarta tersebar di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Tegalrejo, Danurejan, Jetis, Keraton Kotagede dan lainnya. Pada tahun 2022 luas RTHP Kota Yogyakarta 2.62097 km² yang terdiri dari taman kota, hutan kota, jalur hijau di jalan, sempadan sungai, TPU, sempadan rel kereta api dan lain-lain.

Gambar 1.1 Lokasi Persebaran RTHP di Kota Yogyakarta



Sumber: Peta RBI WGS

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan suatu area terbuka yang telah dirancang dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan tempat berkumpul atau melakukan aktivitas bersama di luar ruangan. Pada area RTH terdapat sebidang lahan yang membentang dalam bentuk jalur atau kelompok area. Jalur ini berfungsi untuk menjadikan area tersebut lebih terbuka dan menjadi tempat alami atau disengaja untuk pertumbuhan tanaman dan pohon. Kemudian RTH publik adalah tipe RTH yang dimiliki dan diurus oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.

Mengenai hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki kewenangan dalam hal kebijakan lingkungan hidup, termasuk pengaturan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup. Adapun salah satu fungsi dari Dinas

Lingkungan Hidup itu sendiri yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup.

Pada umumnya ruang terbuka hijau ialah bagian dari ruang terbuka, adanya RTH di sebuah kota memiliki peran yang sangat penting. Selain berperan sebagai elemen ekologi, RTH juga berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan interaksi antara warga perkotaan dalam mengatasi kesibukan aktivitas sehari-hari mereka (Pratomo et al., 2019). RTH tidak hanya berfungsi sebagai pengisi ruang di daerah perkotaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek seperti lanskap, pelestarian lingkungan, keindahan, tempat untuk bersantai, dan aktivitas olahraga. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan RTH diperlukan agar fungsi perannya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap terjaga.

Pembangunan RTH dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan efisiensi penggunaan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), setelah mengalami penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan semestinya. Salah satunya menggunakan lahan RTH sebagai tempat menjemur pakaian pribadi. Kemudian yang menjadi pengelolaan kurang optimal yakni keterbatasan SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan Perbandingan antara luas area kerja dan jumlah personil tidak proporsional. Jika hal tersebut tidak diatasi akan berdampak pada penyediaan layanan optimal kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) terkait dengan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang bertanggung jawab memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh

sebab itu, perlu dilakukan studi yang lebih intensif tentang penilaian sejauh mana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan RTHP. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis memandang penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan RTHP. Maka penulis mengambil judul mengenai **“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diperoleh gambaran dan informasi tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

2. Sebagai suatu bahan rekomendasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan berikutnya untuk meningkatkan kinerja khususnya yang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ikut serta dan keterlibatan dalam menjaga kelestarian dan keberadaan Ruang Terbuka Hijau di daerahnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti digunakan dengan maksud untuk membandingkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.2 Data Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Rifai, 2017)	Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Abhirama Kabupaten Sidoarjo	Pertama, melakukan pemeliharaan, pembangunan, dan penataan taman, serta menjaga agar sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik. Kedua, Departemen Kehutanan dan Pertamanan (DKP)

			<p>berkolaborasi dengan pemilik dan pengelola lahan untuk mengatur penggunaan aset melalui proses perijinan atau permohonan pengelolaan. Ketiga Implementasi pembinaan personil di Taman Abhirama kurang optimal, seperti yang terungkap dari laporan lapangan seorang pegawai tenaga harian lepas (THL) yang menyatakan bahwa pembinaan personil tidak dilakukan dengan baik. Keempat, dalam menjalankan kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan tanaman</p>
--	--	--	---

			<p>di taman, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan pemeliharaan taman mencakup penyapuan, pemotongan, pemupukan, penyiraman, dan pengangkutan sampah.</p>
2.	(Prabawati & Supriyanti, 2021)	<p>Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar telah berhasil menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam hal tanggung jawab, akuntabilitas, dan responsivitas. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam indikator kualitas layanan dan produktivitas. Hasil</p>

			<p>penelitian ini memiliki implikasi yang penting untuk digunakan oleh para pelaksana kegiatan pemberdayaan dalam upaya memanfaatkan potensi daerah mereka secara optimal. Tujuan pengembangan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja dalam hal pemberdayaan.</p>
3.	(Herman & Hartono, 2018)	Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong	<p>Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong masih belum optimal. Ini disebabkan oleh aspek kualitas</p>

			<p>pekerjaan belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini terjadi karena pegawai yang belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan, serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam menguasai teknologi. Kemudian dimensi kuantitas, masih belum mencapai target karena terdapat banyak pekerjaan yang tidak seimbang dengan kompetensi para pegawai. Selanjutnya dimensi waktu, kehadiran yang tidak optimal terkesan menghabiskan waktu untuk bersantai tanpa memperhatikan jadwal yang telah ditentukan.</p>
--	--	--	--

			<p>Pegawai merasa bosan dengan pekerjaan yang melebihi waktu kerja dan terlalu banyak beban tugas yang ditugaskan oleh atasan mereka. Pada dimensi kerjasama, menunjukkan telah terjadi kerjasama antara pegawai yang berbeda dalam menyelesaikan tugas. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antar pegawai sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Namun, dimensi inisiatif menunjukkan kurangnya usaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan kemajuan dalam penyelesaian dianggap lambat.</p>
--	--	--	--

4.	(Cahyani et al., 2021)	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Gowa belum mencapai tingkat produktivitas kinerja yang optimal dalam hal efektivitas. Hal ini dikarenakan target pengurangan sampah yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Jakstrada belum terpenuhi. Selain itu, upaya pencapaian kerja yang dilakukan juga belum berhasil mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2019. Akibatnya, sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Gowa tidak mencukupi standar. Kemudian kualitas layanan cukup baik, terutama jika
----	------------------------	---	---

			<p>dilihat dari respons positif yang hampir seluruhnya diterima dari masyarakat. Hal ini terlihat dari aspek fisik bangunan tempat pembuangan sampah yang terlihat baik, kedisiplinan dan keramahan petugas, sarana dan prasarana pendukung yang ada, serta keterkaitan dengan pembayaran iuran pembuangan sampah. Responsivitas terhadap pengelolaan sampah telah baik, seperti yang ditunjukkan oleh situs web yang memungkinkan saran dan kritik serta kemampuan untuk cepat menangani laporan dan keluhan tentang problem</p>
--	--	--	---

			<p>sampah yang masuk dari pihak berwenang dan masyarakat. Terakhir</p> <p>responsibilitas,</p> <p>mengevaluasi tingkat kesesuaian pegawai dalam memahami dan melakukan tanggung jawab dan fungsi sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ditunjukkan oleh pembagian dan pemahaman pegawai tentang tanggung jawab dan fungsi tersebut, serta proses tugas persampahan sepadan dengan standar aturan yang berlangsung.</p>
5.	(Kojongian et al., 2019)	<p>Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Dalam Menanggulangi</p>	<p>Keberhasilan kinerja suatu organisasi dapat dicapai dengan baik karena bergantung pada kemampuan individu</p>

		<p>Eceng Gondok di Danau Tondano (studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa)</p>	<p>yang menjalankannya. Jika individu-individu tersebut memiliki pemahaman yang jelas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing, maka organisasi secara otomatis akan beroperasi dengan efektif. Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ketika melihat individu atau anggota tim yang sedang menjalankan tugas, sudah jelas bahwa aspek pendidikan dan keahlian di bidang masing-masing telah terpenuhi. Kinerja pegawai akan optimal jika didukung</p>
--	--	--	--

			<p>oleh alokasi anggaran yang memadai, karena anggaran memiliki peran penting dalam mendukung kinerja mereka. Namun, terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat atau pihak yang terlibat dalam penanggulangan eceng gondok. Selain itu, fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani masalah eceng gondok juga terbilang minim di sisi lain.</p>
6.	(Harsiana et al., 2021)	Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten	Secara umum, pengelolaan objek wisata Gua Batu Cermin oleh Dinas Pariwisata

		<p>Manggarai Barat dalam Pengelolaan Gua Batu Cermin</p>	<p>dan Kebudayaan belum optimal. Penyebabnya adalah karena hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata Gua Batu Cermin dan objek wisata lainnya di Kabupaten Manggarai Barat. Akibatnya, sistem ini dianggap tidak efisien dan efektif. Berdasarkan evaluasi kinerja pengelolaan daya Tarik wisata Gua Batu Cermin, ditemukan bahwa pengunjung merasa tidak puas dengan toilet sebagai atribut yang sangat penting. Oleh karena itu, perbaikan toilet menjadi prioritas utama yang perlu dilakukan.</p>
--	--	--	--

7.	(Aulia, 2019)	<p>Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Banjarbaru</p>	<p>Kinerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja UKM dalam mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) dinilai positif. Ini terlihat dari aspek produktivitas, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas ini telah memberikan kepuasan dan manfaat yang besar bagi para pelaku UKM. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya, dalam hal pencatatan produktivitas UKM yang belum dikelola dengan baik, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan dan sosialisasi yang</p>
----	---------------	--	---

			<p>dilakukan oleh pegawai Dinas. Walaupun begitu, pelayanan yang diberikan oleh Dinas dianggap baik, terbukti dari fasilitas yang memadai dan sikap ramah para pegawai. Respons terhadap keluhan dari UKM juga dinilai positif, dengan tindakan yang cepat dan efektif dari pihak Dinas dalam menanggapi masalah yang dihadapi oleh UKM.</p>
8.	(Kobogau et al., 2018)	Kinerja Dinas Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Mimika	<p>Pengangkutan sampah pasar di Kota Timika sangat bergantung pada jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, rata-rata jumlah sampah pasar yang dihasilkan</p>

			<p>per hari ditentukan oleh frekuensi pengangkutan. Dengan menggunakan truk yang dapat membawa beban hingga 7 ton, rata-rata beban sampah yang diangkut setiap harinya dari pasar di Kota Timika yaitu 182 ton. Dinas kebersihan hanya perlu mengangkutnya setiap hari tanpa kesulitan untuk memilahnya lagi. Jaya mengungkapkan bahwa melalui kerja sama antara berbagai pihak dalam kemitraan, masalah sampah yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Kota Timika dapat diatasi. Selain itu, ia juga mengusulkan pentingnya sosialisasi oleh Pemerintah daerah</p>
--	--	--	---

			<p>kepada masyarakat mengenai cara yang benar dalam membuang sampah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan dan agar tersedia banyak tempat sampah di setiap RT/RW tempat tinggal kita.</p>
9.	(Alamanda & RFS, 2022)	<p>Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Agam</p>	<p>Beberapa indikator kinerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam belum mencapai potensi maksimal. Meskipun layanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas telah berjalan baik, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Indikator produktivitas menunjukkan</p>

			<p>kekurangan, terutama dalam kompetensi sumber daya manusia di Dinas Ketenagakerjaan. Diperlukan penambahan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan prasarana untuk layanan yang meski sudah cukup baik, namun masih memiliki kekurangan dalam bentuk peralatan dan infrastruktur pelatihan yang belum memadai karena keterbatasan anggaran. Responsivitas juga menjadi isu, dengan kekurangan dalam aspek ini dan masih ada hambatan-hambatan yang perlu diatasi.</p>
10.	(Taek et al., 2020)	Kinerja Dinas Pemberdayaan	Kinerja Dinas Pemberdayaan

		<p>Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Masyarakat dan Desa di Kabupaten Belu belum mencapai tingkat maksimal dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa. Hal ini disebabkan ada kekurangan dalam membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta adanya kelemahan dalam kapasitas SDM yang ada di Dinas PMD dan kurangnya dukungan sarana prasarana pendukung. Disamping itu, belum ada mekanisme untuk mengumpulkan tanggapan dari masyarakat sebagai pengguna layanan guna</p>
--	--	---	---

			<p>meningkatkan kinerja Dinas PMD. Kemudian, persoalan lain yang timbul adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan staf yang bekerja di Dinas PMD, sehingga mereka kurang memahami tugas dan fungsi mereka secara menyeluruh. Hal ini juga berdampak pada kurangnya pemahaman terkait pemberdayaan masyarakat, karena pengembangan sumber daya manusia tidak mendapat perhatian yang cukup.</p>
--	--	--	--

Dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan terfokus pada analisis kinerja dinas dalam hal peningkatan, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan ini hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan peneliti sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi.

Adapun titik fokus yang diteliti adalah kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta dalam hal ini sebagai upaya mencapai peningkatan optimal yang dapat dicapai dalam kinerja suatu organisasi sehingga kedepannya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini, peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang masih terkait dengan topik penelilitan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

1.6.1 Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah prestasi dari individu atau sekelompok pegawai yang sesuai dengan tugas dan kekuasaan mereka dalam mencapai tujuan organisasi (Suyadi, 2007). Dengan kata lain, hubungan yang erat terbentuk antara kinerja individu dan kinerja tim di dalam suatu organisasi. Ketika seseorang bekerja dengan baik dan memenuhi tugas yang telah diserahkan, dampaknya akan dirasakan pada kinerja keseluruhan organisasi yang akan menjadi lebih baik. Mahsun berpendapat bahwa kinerja adalah deskripsi tentang upaya meningkatkan kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis organisasi (Mohammad, 2006).

Menurut Sinambela kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, yang harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, dengan tujuan mencapai kesuksesan dalam berorganisasi serta harus diakui dan tidak boleh melanggar hukum (Sinambela, 2012). Sementara kinerja menurut Erlianti adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian yang diperoleh oleh seseorang atau suatu organisasi dalam menjalankan tugas dalam jangka waktu yang pasti (Erlianti & Fajrin, 2021).

b. Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun yang dikutip dari Rumagit pengukuran kinerja adalah proses evaluasi kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan informasi seperti penggunaan efisien sumber daya dalam produksi barang dan jasa, kualitas barang dan jasa dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, perbandingan hasil proses dengan tujuan yang dimaksudkan, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Rumagit et al., 2022).

Menurut Junaedi “Pengukuran kinerja adalah langkah untuk mencatat dan mengukur sejauh mana kegiatan telah mencapai tujuan dalam mencapai misi organisasi, dengan menunjukkan hasil-hasil seperti produk, layanan, atau proses yang telah dicapai. Dengan kata lain, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan bagaimana keterkaitannya dengan pencapaian tujuan jangka panjang

perusahaan yang tercermin dalam visi dan misi organisasi (Junaedi, 2002).

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja adalah prestasi atau output dari pekerjaan dalam suatu kegiatan, aktivitas, atau program yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dalam Hessel Nogi kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal;
- d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi (Hessel, 2005).

d. Indikator Kinerja

Menurut Dwiyanto yang dikutip dari Afrizal memberikan penjelasan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu:

- 1) Produktivitas

Secara umum, produktivitas dapat dijelaskan sebagai kaitan antara barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, bahan, dan uang. Produktivitas merupakan ukuran efisiensi dalam proses produksi, yang menggambarkan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang digunakan. Seringkali, masukan yang dibatasi adalah tenaga kerja, sementara keluaran diukur dalam berbagai bentuk seperti satuan fisik dan nilai.

2) Kualitas Layanan

Masalah tentang pentingnya kualitas layanan semakin meningkat dalam menggambarkan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif tentang organisasi publik muncul karena masyarakat tidak puas dengan kualitas layanan yang mereka terima dari organisasi tersebut.

3) Responsivitas

Responsivitas merujuk pada kemampuan birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang jadwal dan prioritas layanan, serta menghasilkan program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

4) Responsibilitas

Menggambarkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau mengikuti kebijakan organisasi, serta menunjukkan tanggung jawab individu terhadap tugas-tugas yang terkait dengan peran mereka dalam melayani pihak yang dilayani.

5) Akuntabilitas

Mempunyai arti bahwa suatu entitas memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan hasil dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi, mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, melalui pelaporan berkala yang dilakukan (Afrizal, 2018).

1.6.2 Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau merupakan area yang memungkinkan berbagai aktivitas, termasuk olahraga dan bermain, di lahan yang luas dengan kepemilikan publik atau semi-publik, wilayah ini terletak pada lahan yang tidak terbangun dan tidak memiliki bangunan di atasnya, sehingga memberikan pemandangan terbuka yang menarik baik di dalam maupun di luar bangunan (Islami & Suheri, 2018). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada area luas yang didominasi oleh keberadaan berbagai jenis tanaman seperti taman yang dirancang dengan baik, pepohonan yang menghiasi jalanan, atau hutan perkotaan (Astuti et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Ruang Terbuka Hijau Kota merupakan komponen dari area terbuka di perkotaan yang ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan dan vegetasi dengan tujuan utama RTH adalah untuk memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kota, termasuk kenyamanan, keamanan keindahan, dan kesejahteraan wilayah perkotaan tersebut.

b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota. Ruang terbuka hijau direncanakan dengan menata tumbuhan, tanaman, dan vegetasi untuk mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut.

- a) Fungsi ekologis; diharapkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan mendukung pengaturan iklim mikro.
- b) Fungsi sosial budaya; diharapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan

yang mendukung interaksi sosial, tempat rekreasi, dan menjadi penanda atau landmark di kawasan tersebut.

- c) Fungsi arsitektural/estetika; RTH dapat meningkatkan estetika dan kepuasan lingkungan di wilayah tersebut dengan adanya jalur hijau dan taman.
- d) Fungsi ekonomi; Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam mengembangkan fasilitas wisata hijau di perkotaan. Dengan demikian, dapat menarik minat masyarakat atau wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Hal ini pada akhirnya dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Kinerja

Kinerja merujuk pada hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dan dapat diukur. Ini mencakup catatan tentang prestasi yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan khusus atau kegiatan selama periode waktu tertentu. Kinerja juga terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai hasil kerja yang diinginkan.

1.7.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau merupakan sebagian dari ruang-ruang terbuka dalam suatu wilayah yang ditanami oleh berbagai jenis tumbuhan, dan vegetasi, baik yang asli maupun yang diperkenalkan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial-budaya, dan

arsitektural. Sebagai bagian dari perencanaan tata kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran yang krusial dalam mengendalikan laju pembangunan yang pesat. Ruang terbuka hijau kota memainkan peran penting dalam menciptakan struktur kota, dan berfungsi sebagai penunjang ekologis kota serta sebagai ruang terbuka yang meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di suatu daerah.

1.8 Definisi Oprasional

Menurut Dwiyanto yang dikutip dari Ismoyo terdapat lima indikator yang bisa mengukur kinerja birokrasi publik diantaranya yaitu: 1) Produktivitas, 2) Kualitas Layanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas (Ismoyo, 2017).

Tabel 1.3 Indikator Kinerja

Variabel	Indikator	Parameter
Produktivitas	1. Efisiensi	- Penggunaan anggaran yang efisien dalam pengelolaan RTHP
	2. Keterampilan	- Kemampuan pegawai mengelola RTHP sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan
Kualitas Layanan	1. Sikap pegawai	- Pegawai disiplin melaksanakan tugas penanaman dan pemeliharaan tanaman dalam pengelolaan RTHP
	2. Keandalan	- Pegawai memahami, handal, mandiri dan

		profesional atas tugasnya dalam pengelolaan RTHP
Responsivitas	1. Respon cepat	- Kecepatan merespon keluhan masyarakat mengenai pengelolaan RTHP
Responsibilitas	1. Manajemen	- Kemampuan menjalankan manajemen perencanaan sampai pelaksanaan tugas pengelolaan RTHP
Akuntabilitas	1. Monitoring dan evaluasi	- Monev perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan RTHP

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan secara umum, metode penelitian dianggap sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan tahapan-tahapan seperti menetapkan topik, mengumpulkan dan analisis data untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang lebih baik mengenai topik, fenomena, atau masalah yang diteliti (Raco, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk mengumpulkan data. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mencari pemahaman mengenai fenomena di dalam suatu konteks khusus dengan menggunakan pendekatan naturalistik (Barlian, 2018). Dalam hal ini fenomena yang dimaksud yaitu mengenai pengelolaan RTHP oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif merujuk pada suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan atau metode lain yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan, tulisan, dan sejenisnya, yang mendukung proses penelitian (Moleong, 2018). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah fokus pada pemecahan masalah yang relevan dengan situasi yang signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengumpulan data yang akurat dan analisis yang sistematis, dengan tujuan untuk mencapai kepastian dalam penelitiannya.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian sangat penting untuk mengumpulkan informasi dalam penyusunan, sehingga peneliti harus memiliki lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam mengelola RTHP di Kota Yogyakarta.

1.9.2 Jenis Data Penelitian

Untuk tujuan penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi yang relevan dengan tema penelitian yang sedang diteliti.

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian atau

lapangan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari wawancara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan tentang ruang terbuka hijau. Data primer didapatkan secara langsung dari sumber informasi lapangan melalui proses wawancara mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dengan kepala dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, kepala bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan masyarakat sekitar RTHP guna mengumpulkan data mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta.

B. Data Sekunder

Data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumbernya, tetapi digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan. Peneliti memperoleh data ini melalui studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan jenis data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumentasi, laporan, buku, majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dokumen formal atau non formal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta seperti laporan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan RTHP seperti LKIP, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pengelolaan RTHP dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg, yang dikutip dari Sugiyono wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu dengan maksud saling menukar informasi dan ide melalui serangkaian tanya jawab, yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam konteks ini, peneliti memakai teknik wawancara semi terstruktur, di mana peneliti memiliki kebebasan yang lebih besar dalam melakukan wawancara. Meskipun begitu, peneliti masih menggunakan sebuah panduan wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya sebelum menuju ke lapangan, dan menyiapkan beberapa pertanyaan serta jawaban. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat terbuka dengan:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Rina Aryati Nugraha, ST, M.Eng.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	1 (satu) orang
2	R. Kakung Wahyu Wibowo, ST, SH.	Staff Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	1 (satu) orang

3	Abdul Fatah	Masyarakat di RTHP Kricak	1 (satu) orang
4	Widodo	Masyarakat di RTHP Kricak	1 (satu) orang
Jumlah			4 orang

1. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok dalam membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang ruang terbuka hijau publik. Peneliti memilih informan kepala bidang RTHP karena beliau ahli di bidangnya, pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan terkait RTHP, kemudian memiliki akses langsung dan informasi kunci terkait RTHP.

2. Staff Pengelolaan RTHP

Staff yang berada di bidang Ruang Terbuka Hijau Publik bertugas untuk mengelola RTHP di wilayah Kota Yogyakarta. Peneliti memilih staff pengelolaan RTHP sebagai informan karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait pengelolaan RTHP.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka hijau di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini masyarakat yang berada di dekat RTHP Kricak. Pada dasarnya pemilihan informan yang berada di dekat RTHP karena diharapkan bisa memberikan pandangan yang lebih

mendalam dan relevan, kemudian lebih mudah diakses dan cenderung lebih terlibat dalam aktivitas berkaitan RTHP tersebut.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam metode kualitatif adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan dokumen berupa gambar, formulir, arsip, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tertulis atau non tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta informasi lain yang dapat digunakan sebagai bagian penting dalam penelitian ini.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis melalui pengumpulan data dan fakta dari lapangan. Data kemudian digambarkan dan ditafsirkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat. Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip dari Sugiyono terdapat empat kegiatan dalam proses analisis data yaitu (Sugiyono, 2019).

1. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan pengambilan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara, dokumen, situs web, jurnal sebelumnya, dan catatan lapangan. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, tanpa asumsi atau interpretasi dari peneliti, melainkan berdasarkan pengalaman atau temuan peneliti selama pengumpulan data.

2. *Data Reduction/Reduksi Data*

Proses reduksi data merupakan tahapan di mana seorang peneliti melakukan seleksi dan pemilahan terhadap informasi penting, dengan fokus pada elemen yang paling relevan, mengidentifikasi tema dan pola yang terkait, serta membuang data yang tidak relevan. Kemudian merangkum hasil seleksi tersebut sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan pola dan tema yang telah diidentifikasi, serta memberikan panduan yang jelas untuk langkah pengumpulan data berikutnya.

3. *Data Condensation/Kondensasi Data*

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data hasil dari interview, catatan lapangan, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan memanfaatkan data tersebut, data akan menjadi lebih kuat dan berdaya guna. Fokus dari penyajian data adalah mengintegrasikan informasi yang ada sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dan dapat memahami informasi yang terkandung dalam data dengan mudah.

4. *Conclusion Drawing and Verification/Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi*

Penarikan kesimpulan ialah proses konfigurasi dari keseluruhan hasil penelitian melibatkan penggabungan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis, sehingga ditemukan kesesuaian dan kebenaran yang mampu menghasilkan hasil yang konsisten dan valid.